



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1030 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodasi usulan nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana diatur dalam 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, perlu menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;
 - b. bahwa untuk mengakomodasi adanya perubahan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal, perlu menetapkan kembali Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menandatangani Surat Keterangan Asal melalui penandatanganan secara basah disertai cap, *affix/scan* tanda tangan disertai cap, dan *digital signature/barcode*.
2. meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
3. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

KETIGA : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd

VERI ANGGRIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1030 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
1	01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA	1. MOHD. TANWIER
					2. T. SATRIA WIRA
					3. HALIM FIRDAUS
					4. SUSILAWATI
					5. RIZKY WAHYUDI
2	01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	LSM	1. ISKANDAR
					2. IRWANDI
					3. YUSNAINI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
3	01.10	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	SABANG	DKS	1. HENDRA SETIAWAN
					2. WARDIANA
					3. SYAMSUL BAHRI
4	01.11	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH	TAKENGON	TKG	1. ARNI SARI LUBIS
					2. RIYANDIKA PUTRA
					3. SARINI MUHAMMAD ALI
					4. DIKI SUHANDA
5	02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN	1. ASPAN SOFIAN
					2. AZRAI RIDHO HANAFIAH
					3. ISSATRIANANDA EVI DORIA HAFNI
					4. FERY ARIFianto
					5. ROEDY FAHRIZAL
6	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU MEDAN	MEDAN	TMD	1. CUT MAULITA
					2. INDRA KURNIAWAN
					3. FERRY HARRYANTO

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
7	02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM	1. ALBERT RISMAWANTO SARAGIH
					2. IKUTAN GINTING
					3. NAOMI SIGALINGGING
					4. DEWI SARTIKA SITUMORANG
8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG	1. ASBEN HENDRI
					2. RIDONALD
					3. SYAFRIZAL
					4. DEFITRA
					5. RR. KOES INDRALINA
9	04.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB	1. M. TAUFIQ OESMAN HAMID
					2. LISDA ERNI
					3. NURFIANTI
					4. HALIMATUSAKDIAH
					5. ZIKRA MELINDA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
10	04.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERANTI	SELAT PANJANG	MTI	1. RIDWAN H
					2. HIDAYAT
					3. YUSNITA
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL	1. DHOAN DWI ANGGARA
					2. SALBIAH
					3. EKA RHANTY WARDANI
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP	1. RIZKI BINTANI
					2. SETIA KURNIAWAN
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB	1. INDRA HIDAYAT
					2. ALFENI HARMI
					3. DEVI OCTARINA
14	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM	1. HERMANTO
					2. WAN SUDIRMAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					3. ASMAYANTI
					4. SLAMAT RIYADI
					5. AMI LAILY
15	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM	1. GUSTIAN RIAU
					2. LENY NURISKAWATY
					3. ABDUL RASYID
					4. TOVANI WAHYU HANDAYANI
16	21.02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM	1. FAISAL RIZAL
					2. SULARNO
					3. HAZNU ZAMSYAH
					4. M. ROSMANSYAH
17	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM	1. DENNY TONDANO
					2. YANI ALKINDI
					3. WILMAR SITORUS

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
18	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB	1. HARMADELI 2. FATIMAH 3. TUSYADI
19	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB	1. AHMAD RIZALI 2. ACHMAD MIRZA 3. FAROHMA
20	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL	1. YENITA SYAIFUL 2. ASFIANI 3. RIA AYU WIDYASARI 4. BUNGE GERALDINE 5. SUPARDIYANTO
21	08.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL	1. ELVIRA UMIHANNI 2. RATNA MELIASARI 3. TEGUH WINARNO 4. JUWITA PRIMA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
22	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA B ^L LITUNG	PANGKAL PINANG	PPG	1. FADJRI DJAGAHITAM
					2. DARMA KURNIAWAN
					3. ZURISTA
23	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP	1. RITA YULIANI
					2. RONAL IRAWAN
					3. NOVITA KESUMAWATI
24	30.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN	BANTEN	BTN	1. BABAR SUHARSO
					2. TETI ELWATI
					3. RIFKI RAMADONA
					4. EULIS MULYANA
					5. TANIA NUR RIZKIAH
25	30.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN	SERANG	SER	1. ADANG RAHMAT
					2. ACEP PELITAJAYA
					3. ABDUL MUTI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		SERANG			
26	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR	1. H. UJANG SUDIARTONO 2. HJ ETI SISWIATI RAHAYU 3. ISKANDAR NORDAT 4. SYARIPUDIN 5. AKHMAD TITO GIARTHO
27	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG	1. SULI ROSADI 2. SHANDY SULAEMAN 3. OKI RAHMADI 4. EKA APRIYANTI 5. GHEA SARI WARDHANI
28	30.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON	CILEGON	KCG	1. SYAFRUDIN 2. EMA HERMAWATI 3. FAISAL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
29	09.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT	1. ELISABETH RATU RANTE ALLO 2. ETY SYARTIKA 3. PILAR HENDRANI 4. BADIA RAJA H. SIREGAR 5. UPI SUSTILALIZA
30	09.01	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS	1. DEDY DWI WIDODO 2. SISCA MAYA KADANG 3. ABDI NUSA 4. MARTA LAMINDO SIANTURI
31	09.02	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM	1. PARULIAN TAMPUBOLON 2. RIANA LIESDAWATY 3. PARTINI 4. RICO EKA PUTRA RIFAI 5. YUNITA RACHMAH

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
32	09.03	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOT/ ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP	1. DERLIANA MELINDA SAGALA
					2. VICKY SURYAWAN JAYA
					3. HERMI ANDRIANI
					4. JENAL ARIPIIN
					5. MILAN DARSANA
33	09.04	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB	1. IKA ADHIS RBM
					2. EEN HERAWATI
					3. NESVY PANDJAITAN
34	09.05	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU	1. YATI SUDIHARTI
					2. DARMADI
					3. ANDINI SUTIANI
					4. OBERLIN HUTAPEA
					5. NURPIDA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
35	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN CAKUNG	CAKUNG	KBN-CK	1. ALIF ABADI 2. SATRIO WITJAKSONO 3. INDRA DWIJANTO 4. SUKIRMAN 5. EEN HENDAYANI
36	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN MARUNDA	MARUNDA	KBN-MR	1. ALIF ABADI 2. SATRIO WITJAKSONO 3. ROOSENO 4. SUPARNO 5. HARDO DEDALI
37	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG	BDG	1. IENDRA SOFYAN 2. DENDI HERMADI 3. MEIDY MAHARDANI 4. DINDIN HADIAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
38	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN	1. PEDRI HARIYANTO
					2. YANG SINI
					3. HENDAR SUHENDAR
39	10.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB	1. AAM AMMAR HALIM
					2. ELA NURLAELA
					3. VICTOR DOLLAR PARDOMUAN
					4. TUTIK HERYANTI
40	10.04	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG	1. DICKY ANUGRAH
					2. WAHYU WARTANTI
					3. LILIS NURHAYANI
					4. DIDI KUSDIAMAN
41	10.06	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	TSM	1. IWAN RIDWAN
					2. SOUFIAN
					3. SALSAH
					4. NURDANI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
42	10.09	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR	1. DADANG SUHENDRA 2. IWAN SUROSO 3. INNA KURNIAWATI
43	10.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA	1. KARLIATI JUANDA 2. WITA GUSRIANITA 3. SUTRISNO 4. BAMBANG KOSWARA
44	10.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KRW	1. AHMAD SUROTO 2. AHMAD MUSTOPA 3. GERY SIGIT SAMRODI 4. SUSILAWATI
45	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI	1. MUCHLIS 2. NI GALUH CHANDRA 3. AGUS BURHAN AHMAD FARIZ 4. INDAH INTAN PERMATASARI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					SETIAWAN
46	10.18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM	5. YULIATI 1. AYI JAMIAT 2. WIDYA YUDHA SETIAWAN 3. DEDEN SUPRIYATMAN 4. RISMAWAN
47	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD	1. ELLY WASLIAH 2. BARIATI RATNA AJU 3. MUAMMAR KHADDAFI F B 4. MUHAMMAD QADAFI 5. GERALDO GUNAWAN
48	10.20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON	CIREBON	KCR	1. IING DAIMAN 2. SRI WAHYUNING HADI 3. NYI RADEN TERIN METERINA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
49	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS	1. TEDI HAFNI TRESNADI
					2. ROMI PAYAN
					3. AGUS PURWANTO
					4. RUSIAH
50	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR	1. M. ARIF SAMBODO
					2. HARYANTA
					3. NUR RAHMI SA'ADAH
					4. HIMAWAN PUJI NUGROHO
					5. SRI HARTININGSIH
51	11.01	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP	CILACAP	CLP	1. UMAR SAID
					2. MUHAJIR
					3. MOESTIKA PERMANA SARI
					4. BUANG SURIPTO
52	11.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL	KENDAL	KEK-KD	1. ANANG WIDIASMORO
					2. ANDY NUR KARENDRA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					3. HADI PRIBUSONO
					4. CATUR YOSIAWAN INDRIANTO
53	11.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR	1. HERU SUNARDI
					2. ERNI SUSIATUN
					3. ENDANG KURNIA MAHARANI
					4. VERONICA ERNA KUSUMANINGSIH
54	11.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	SURAKARTA	TSL	1. SENEN
					2. HARTINI UTAMI
					3. B.KUSNANDAR
55	12.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA	1. IDA SURYANTI LESTARI
					2. INTAN MESTIKANINGRUM
					3. THERESIA SUMARTINI
					4. ROSALIA TRILILIS INDRIYATI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
56	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY	1. DRAJAT IRAWAN 2. ERIVINA LUCKY KRISTIAN 3. PUSPITA PRAMILUWATI 4. NURING RETNOWATI 5. ELOK SYAFRIDA
57	13.10	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW	1. RR. NANIN OKTAVIANTIE 2. SUMINTEN 3. SITI MAHMUDAH
58	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR	1. MARIA ULFA 2. MITA KRISTIANI 3. EKO PARINGAN
59	13.25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	GRESIK	GRS	1. AGUS BUDIONO 2. MINHAD 3. SUNIK 4. RIKE ROOSWITA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
60	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB	1. ABDIEL POPANG KABANGA
					2. BUDI NUGRAHENI
					3. KUKUK TRI WAHYUNINGTYAS
61	13.39	UPT. PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB	1. NINIK MARGIRINI
					2. PARAMITA LAKSMI WARDHANI
					3. ALEIXO DA SILVA
					4. SITI SAROH
62	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA	1. SYARIF KAMARUZAMAN
					2. EKO DARMAWANSYAH
					3. DWI YOGA DIANA FITRI
63	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY	1. ASTER BONAWATY M
					2. ADI SOESENSO
					3. PRAMUDYA ERLANGGA
					4. EVELINA DIAN MAYASARI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
64	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN	1. MUHAMMAD AGUSTA WIJAYA
					2. SAID MAHMUD
					3. DARMADI
65	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT	1. ZULHAIDIR
					2. DINA MARIA KRISSETIA SINAMORA
66	15.03	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP	1. ANITA SUMARNI MULDHANI
					2. RAHAYU TRIS GIPIYANTO
					3. YUSI PRIHATINI
					4. RUSNANINGSIH
67	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD	1. MOHAMMAD YADI ROBYAN NOOR
					2. HENI PURWANINGSIH
					3. ALI WARDANA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
68	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR	1. SALIM
					2. FITRIANSYAH
					3. JOKO MARIONO
					4. JULKIPLI
					5. NORALITA
69	16.09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG	1. KAMILAN
					2. NURHIDAYAH
					3. MULYONO
70	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL	1. ARZAEDI RACHMAN
					2. INDIRA PURNAMAJAYA
					3. DEWI SARTIKA
71	16.12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR	1. UNTUNG PRAYITNO
					2. HARI WIJAYA PUTRA
					3. ERNI MARDI ASTUTI
					4. HAIRULLIANSYAH M

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
72	16.13	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK	1. SABRI 2. ARI SUWAGIS TUTI 3. SAPARUDDIN 4. BALEKE 5. MUNAWIR DZASALI
73	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM	1. BIRHASANI 2. MAHYUDIN 3. HELAUNIATY 4. AZHARI
74	17.01	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR	1. KHAIRIL FAJRI 2. ARY MARDANI 3. SRI ASIH HANDAYANI
75	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS	1. NI WAYAN LESTARI 2. I GUSTI NYOMAN GDE SATRYA WIBAWA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					3. GUSTI AYU KADE SUWASTI TANTRA
					4. I ARAMITA ADNYANA
76	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR	1. NI LUH GEDE EKA SUARY
					2. I WAYAN DARMAYASA
					3. IDA BAGUS KETUT WAHYUNADA
77	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR	1. BAIQ DENNY EVITA DARMIYANA
					2. LALU UMAR SYARIF
					3. RACHMAT WIRA PUTRA
					4. ISKANDAR
78	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG	1. M. NASIR ABDULLAH
					2. KIRENIUS TALO
					3. MUHAMMAD A. BUCHARI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
79	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS	1. I DEWA NYOMAN MAHENDRAJAYA
					2. FADILAH RAHMAN PATURUNGI
					3. MUNARTI
					4. SYAMSIDAR
80	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU	1. RICHARD ARNALDO
					2. FAJAR SETIAWAN
					3. FIKRI
81	22.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI	LUWUK	BGI	1. HASRIN KARIM
					2. SRIHANDAYANTI MAADJI
					3. YULIANTI LAMALIU
					4. NINGSIH MAILA
					5. MARIANI MILANG
82	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL	1. IRWAN INDRAYANA
					2. DELVI DIAN SUSANTI
					3. AHMAD RIFAI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
83	34.00	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU	1. BAU AKRAM DAI
					2. MUH. NAJIB ALI
					3. MUH. RUSDIN
84	32.00	DINAS UKM KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL	1. RISJON K SUNGE
					2. ELDAT RAHIM
					3. EKA WIDYASTUTI
85	23.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	MND	1. EDWIN L. KINDANGEN
					2. DARWIN MUKSIN
					3. JEMMY J. PANDEY
86	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU	1. JOHNLI E. TAMAKA
					2. HENGKY M. SUMLANG
					3. MARTINA A. KORAAG

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
87	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR	1. SITTI SALEHA 2. MUSLIMIN 3. MUHAMMAD YASSER TUWU 4. HASNAWATI
88	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN	1. YAHYA KOTTA 2. SYARIF HIDAYAT 3. VIVIANNY STELLA RISAKOTTA 4. ZAINAB USEMAHU 5. MARVIN ARTHUR PELUPESSY
89	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT	1. YUDHITYA WAHAB 2. MUHAMMAD ABDU DJAFAR 3. FARIS BUAMONA
90	26.01	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI	MOROTAI	KEK-MT	1. USMAN TAE 2. CHAIRUL HADAD 3. GUSTI RANDA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
91	27.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	JAYAPURA	JYP	1. HERMAN BLESKADIT
					2. VIEBE GRISELDA LEGRANDS
					3. JOICE FRAN DAISIU
92	27.04	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	MRE	1. TETES GUNANTO
					2. ERNA
					3. NURSYAM
93	28.02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI	1. JAVED O. SIPAHELUT
					2. ABDUL HAKIM
					3. HARSUL LANDUNG
94	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR	1. NIMBROD SESA
					2. MARSYUKI
					3. JENNY FONATABA
					4. LINDA RIYANTI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
95	29.02	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR	1. ABDUL RACHMAN
					2. MEISKE HERIET KUMESAN
					3. TIARA PADJALA
96	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA	TIMIKA	MMA	1. PETRUS PALI AMBAA
					2. SELFINA PAPPANG
					3. DEVILIA LITA PALUMPUN
					4. LIBERT YAN MANGGARA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

VERI ANGGRIJONO